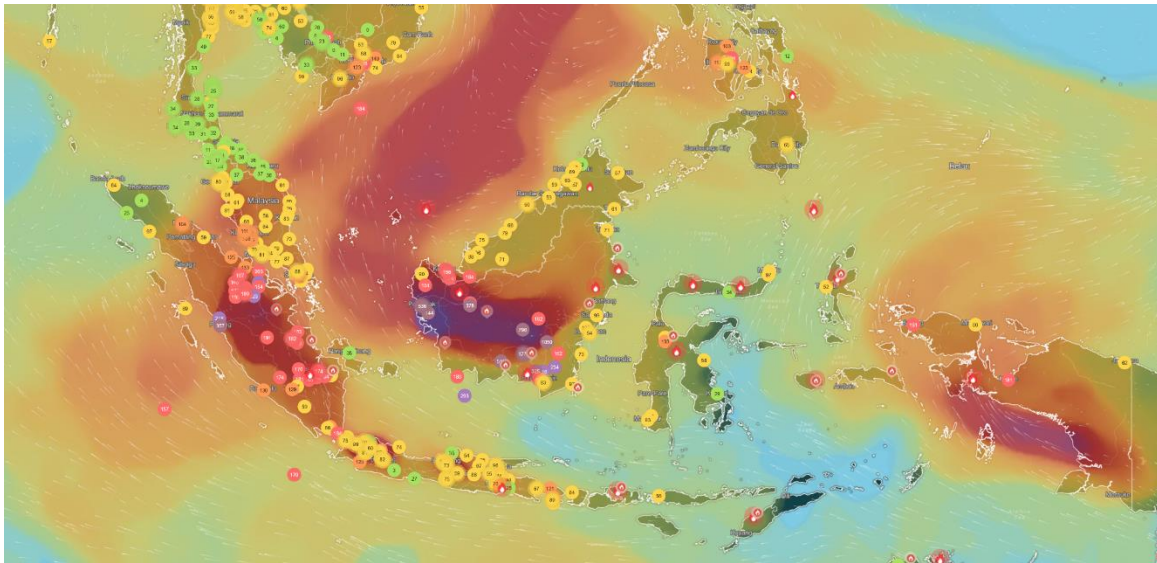




Monthly Sector Report (September '26)

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terjadi di sejumlah wilayah Indonesia dalam waktu belakangan ini, tidak hanya menjadi persoalan lingkungan, tetapi juga memiliki dampak ekonomi yang luas. Tingginya jumlah titik panas dan luas area terbakar, disertai gangguan kualitas udara di sejumlah daerah bahkan dampaknya terasa hingga ke negara tetangga. Kondisi tersebut turut memengaruhi berbagai aktivitas masyarakat dan dunia usaha, mulai dari transportasi, kesehatan, hingga pendidikan.



Dampak tersebut dapat menimbulkan biaya tambahan dan gangguan terhadap produktivitas. Penundaan penerbangan akibat kabut asap, meningkatnya keluhan kesehatan, penyesuaian kegiatan pembelajaran, serta besarnya sumber daya yang dikerahkan pemerintah untuk penanganan karhutla menunjukkan bahwa dampaknya dapat dirasakan oleh pemerintah, masyarakat, maupun pelaku usaha. Dengan demikian, karhutla perlu dipandang sebagai risiko yang dapat memengaruhi operasional, biaya, dan keberlangsungan aktivitas ekonomi di wilayah terdampak.

Bagi pelaku usaha dan investor, pola karhutla yang berulang menunjukkan pentingnya memasukkan risiko kebakaran dan faktor iklim ke dalam perencanaan jangka panjang. Kondisi cuaca, musim kemarau, karakteristik lahan, lokasi aset, serta kesiapan mitigasi menjadi faktor yang perlu diperhatikan dalam mengelola risiko operasional dan investasi. Upaya pencegahan, pemantauan kondisi iklim, serta penyusunan rencana kontinjensi dapat menjadi bagian penting dalam meningkatkan ketahanan bisnis terhadap dampak karhutla.



Karhutla sepanjang 2026 tidak hanya menimbulkan kerugian lingkungan dan kesehatan, tetapi juga memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian dan penerimaan pajak daerah. CELIOS memperkirakan potensi penerimaan pajak daerah yang hilang mencapai Rp269,86 miliar, sementara total kerugian ekonomi dan biaya kesehatan diperkirakan mencapai Rp39,29 triliun hingga Rp123,1 triliun. Besarnya dampak tersebut menunjukkan bahwa karhutla dapat mengganggu berbagai sektor ekonomi secara langsung maupun tidak langsung, sehingga pemerintah perlu memperkuat upaya pencegahan, mitigasi, serta perlindungan masyarakat dan aktivitas usaha di wilayah yang berisiko terdampak.

Berikut kami sajikan informasi dari 3 sektor industri yang memiliki keterkaitan dengan dampak tersebut, yaitu **sektor pertambangan, industri alat berat, dan pasar kendaraan bekas**, sebagai gambaran mengenai potensi perkembangan aktivitas usaha dan pembiayaan di masing-masing sektor.

A. Industri Alat Berat: Dinamika Industri Alat Berat 2026

Di tengah pelemahan penjualan dan pembiayaan pada semester I-2026, industri alat berat masih memiliki peluang dari aktivitas mining, hauling, serta meningkatnya kebutuhan penanganan karhutla dan pembukaan lahan tanpa bakar. Namun, peluang tersebut dihadapkan pada risiko kerusakan aset akibat karhutla dan kenaikan biaya operasional akibat harga BBM nonsubsidi. Dinamika tersebut menjadi faktor penting dalam melihat prospek industri alat berat pada semester II-2026, khususnya dari sisi demand, risiko operasional, dan tekanan biaya.

➤ OJK: Pembiayaan Alat Berat Juni 2026 Terkontraksi 0,22%

Berdasarkan data OJK per Juni 2026, **pembiayaan alat berat oleh perusahaan pembiayaan tercatat sebesar Rp48,65 triliun, turun tipis 0,22% YoY**. Sektor pertambangan dan penggalian masih menjadi kontributor terbesar dengan pembiayaan Rp27,13 triliun atau sekitar 55,76% dari total pembiayaan.

Pelemahan industri juga tercermin dari kinerja pelaku usaha. PT United Tractors Tbk (UNTR) mencatat penurunan pendapatan bersih 15% menjadi Rp58,29 triliun pada semester I-2026. Pada segmen mesin konstruksi, penjualan alat berat Komatsu turun 27% menjadi 1.994 unit, dengan pendapatan segmen turun 28% menjadi Rp15 triliun. Sementara itu, PT Intraco Penta Tbk (INTA) mencatat penurunan penjualan 43,07% menjadi Rp139 miliar.



Meski demikian, OJK memperkirakan pembiayaan alat berat berpotensi membaik pada semester II-2026 seiring meningkatnya aktivitas sektor pengguna alat berat. Prospek sektor mining dan hauling masih terbuka, namun utilisasi unit, keberlanjutan kontrak, harga komoditas, dan arus kas debitur tetap perlu menjadi perhatian.

➤ **Karhutla: Risiko dan Sumber Demand Baru Alat Berat**

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Kalimantan menjadi salah satu perhatian skala nasional di tahun 2026. Berdasarkan keterangan pakar kebijakan lingkungan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), **kondisi El Niño kategori sangat kuat yang menyebabkan penurunan curah hujan dan memperpanjang periode kering meningkatkan kerentanan vegetasi dan lahan gambut terhadap kebakaran**. Namun, faktor iklim bukan merupakan sumber api secara langsung, karena aktivitas manusia seperti praktik pembukaan lahan untuk berkebun atau bercocok tanam dengan menggunakan metode pembakaran serta aktivitas lain yang meninggalkan sumber api juga menjadi pemicu utama. Kondisi panas dan angin kencang selanjutnya dapat mempercepat penyebaran api, sehingga risiko karhutla menjadi lebih tinggi selama periode kering, khususnya pada Agustus–September 2026. Kondisi tersebut tidak hanya berdampak terhadap lingkungan dan kegiatan operasional, tetapi juga meningkatkan risiko kerusakan aset, termasuk alat berat yang dikerahkan untuk mendukung kegiatan penanganan karhutla.

Risiko tersebut terlihat dari beberapa kejadian di sejumlah wilayah Kalimantan Tengah. Pada 10 Agustus 2026, **satu unit ekskavator milik Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur terbakar ketika karhutla melanda kawasan Mentaya Hilir Utara**. Selanjutnya, pada 29 Agustus 2026, **satu unit alat berat juga dilaporkan terbakar di kawasan KM 11 Raja Seberang, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat**. Kemudian, pada 20 September 2026, sebuah **grader milik perusahaan perkebunan kelapa sawit (nama tidak diinformasikan) di Desa Bagendang Tengah, Kecamatan Mentaya Hilir Utara, turut terbakar setelah terjebak kepungan api**. Grader tersebut sebelumnya dikerahkan untuk membuka akses sekaligus membantu penanganan karhutla, namun mengalami kendala hingga tidak dapat bergerak ketika api mendekati lokasi. Kejadian-kejadian tersebut menunjukkan bahwa risiko karhutla tidak hanya berdampak pada aset yang berada di sekitar area kebakaran, tetapi juga dapat mengganggu aktivitas produksi, mobilitas, dan mata pencaharian masyarakat serta menimbulkan kerugian ekonomi dan lingkungan yang lebih luas. Kondisi tersebut berpotensi





menyebabkan downtime unit, tambahan biaya perbaikan atau penggantian aset, serta gangguan terhadap kemampuan debitur dalam menjalankan kegiatan operasional.



Sumber: <https://www.detik.com/kalimantan/berita/d-8639755/alat-berat-terbakar-di-tengah-karhutla-km-11-kobar-asal-api-dipertanyakan/>

Di sisi lain, penanganan dan pencegahan karhutla berpotensi menciptakan sumber demand baru bagi alat berat. Unit dapat digunakan untuk pembuatan kanal, sekat bakar, akses menuju titik api, embung, maupun pembukaan lahan tanpa bakar. Pemerintah juga mendorong penggunaan alat berat, termasuk ekskavator, untuk mendukung pembukaan lahan tanpa pembakaran. Dengan demikian, demand alat berat berpotensi semakin terdiversifikasi dari sektor mining dan konstruksi menuju perkebunan, land clearing, serta kegiatan mitigasi karhutla.

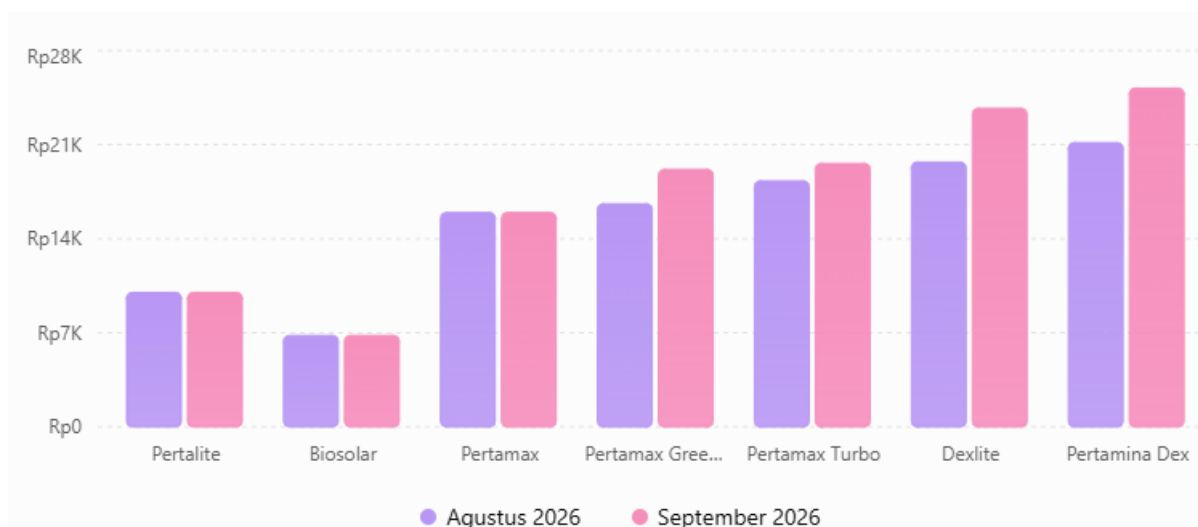
➤ Kenaikan Harga BBM Berpotensi Menekan Biaya Operasional

Pada September 2026, harga Biosolar tetap sebesar Rp6.800/liter, sementara BBM nonsubsidi mengalami kenaikan, antara lain Dexlite sebesar 20,3% menjadi Rp23.700/liter dan Pertamina Dex sebesar 19,1% menjadi Rp25.200/liter. Kenaikan tersebut berpotensi meningkatkan biaya operasional debitur pada sektor trucking, hauling, dan rental alat berat, khususnya bagi pengguna BBM nonsubsidi. Dampak terhadap margin perlu diperhatikan apabila kenaikan biaya BBM tidak dapat diimbangi melalui penyesuaian tarif atau efisiensi operasional.



Berikut perbandingan harga BBM Pertamina Agustus vs September 2026

Nama SPBU	Nama Produk	Jenis	Harga / Liter (Dalam Rupiah)		Keterangan
			Agustus 2026	September 2026	
Pertamina	Biosolar	Diesel	6.800	6.800	Tetap
	Pertalite	RON 90	10.000	10.000	Tetap
	Pertamax	RON 92	15.950	15.950	Tetap
	Pertamax Green 95	RON 95	16.600	19.150	Naik +15,4%
	Pertamax Turbo	RON 98	18.300	19.600	Naik +7,1%
	Dexlite	Diesel, CN 51	19.700	23.700	Naik +20,3%
	Pertamina Dex	Diesel, CN 53	21.150	25.200	Naik +19,1%



Sumber: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20260921071808-4-769383/resmi-harga-bbm-di-spbu-pertamina-bp-shell-berlaku-21-september-2026>



Nadya Citra Multasya
(Analisis Kredit)

Dari perspektif lending, industri alat berat pada semester II-2026 masih memiliki peluang pertumbuhan, meskipun recovery demand belum merata dan risiko operasional tetap perlu diperhatikan. Dalam penilaian kredit, aspek utama yang perlu diperhatikan meliputi keberlanjutan kontrak, utilisasi unit, ketergantungan pada sektor mining/hauling, sensitivitas terhadap kenaikan BBM, risiko lokasi operasional, serta kemampuan cash flow dalam memenuhi kewajiban pembiayaan.

Debitur dengan kontrak, utilisasi, dan cash flow yang memadai memiliki risiko yang lebih terukur, sementara debitur dengan utilisasi rendah atau eksposur tinggi terhadap risiko operasional memerlukan mitigasi dan monitoring yang lebih ketat.

B. Industri Pertambangan : Penguatan Pengendalian Karhutla dan Meningkatnya Tanggung Jawab Perusahaan Tambang

Isu kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menjadi salah satu perhatian utama pemerintah pada Agustus–September 2026, khususnya di wilayah Sumatra dan Kalimantan. Pemerintah semakin memperluas keterlibatan perusahaan, termasuk perusahaan pertambangan, dalam upaya pencegahan, mitigasi, pemadaman, dan pemulihan pascakebakaran.

Pada 23 Agustus 2026, pemerintah mendorong perusahaan sawit dan pertambangan untuk turut membantu penanganan karhutla. Kebijakan tersebut kemudian diperkuat melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 11 Tahun 2026, yang ditandatangani pada 31 Agustus 2026. Melalui kebijakan tersebut, pemegang IUP dan IUPK diwajibkan memiliki sistem manajemen pencegahan kebakaran serta sarana tanggap darurat, termasuk kesiapan ekskavator.

Di sisi lain, pemerintah juga meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap perusahaan yang wilayah konsesinya terdampak karhutla. Kementerian Kehutanan menjatuhkan sanksi administratif kepada enam perusahaan dengan total areal terbakar 1.511,55 hektare, sementara KLH menyatakan telah membawa 19 perusahaan ke proses hukum dengan total area terbakar mencapai 11.046,69 hektare.



➤ **Pemerintah Mendorong Keterlibatan Perusahaan Tambang**

Pemerintah meminta dunia usaha, termasuk perusahaan pertambangan, untuk berperan aktif dalam penanganan karhutla. Perusahaan tidak hanya dituntut menjaga wilayah operasionalnya, tetapi juga diharapkan dapat mendukung penanganan kebakaran melalui sumber daya, fasilitas, dan alat berat yang dimiliki. Keterlibatan tersebut menunjukkan adanya perubahan pendekatan pemerintah, dari penanganan yang sebelumnya lebih banyak bertumpu pada pemerintah dan aparat menjadi kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha.

Bagi sektor pertambangan, hal ini meningkatkan pentingnya kesiapan perusahaan dalam hal; sistem pencegahan dan pengendalian kebakaran; ketersediaan alat berat dan sarana tanggap darurat; patroli dan pemantauan wilayah operasional; koordinasi dengan pemerintah dan masyarakat sekitar; dan pemulihan area yang terdampak kebakaran.

➤ **Kewajiban Penyediaan Ekskavator**

Salah satu perkembangan penting adalah diterbitkannya Inpres Nomor 11 Tahun 2026 tentang Penguatan Penegakan Larangan Pembukaan Lahan dengan Cara Membakar serta Pengendalian Karhutla. Bagi sektor pertambangan, pemegang IUP dan IUPK diarahkan untuk menyusun sistem manajemen pencegahan kebakaran dan memelihara sarana tanggap darurat, termasuk menyiapkan ekskavator. Ekskavator dapat dimanfaatkan untuk mendukung pemadaman maupun pencegahan, termasuk untuk menggali kanal dalam kondisi tertentu guna membantu pengaturan aliran air di wilayah terdampak. Pemerintah juga mendorong patroli dan pemantauan bersama masyarakat di sekitar wilayah operasional.

Implikasi bagi perusahaan tambang: kebutuhan investasi dan biaya operasional untuk kesiapsiagaan karhutla berpotensi meningkat, terutama bagi perusahaan yang beroperasi di wilayah dengan tingkat risiko kebakaran tinggi.



➤ Risiko bagi Perusahaan Pertambangan

Jenis Risiko	Potensi Dampak terhadap Perusahaan Pertambangan
Regulatory Risk	Bertambahnya kewajiban perusahaan dalam menerapkan sistem pencegahan dan pengendalian karhutla, termasuk pemenuhan sarana prasarana tanggap darurat, kesiapan alat berat, patroli, serta monitoring area operasional.
Operational Risk	Potensi terganggunya kegiatan operasional pertambangan akibat kebakaran di dalam maupun sekitar wilayah konsesi, termasuk kemungkinan penghentian sementara aktivitas tertentu untuk mendukung proses pemadaman dan mitigasi.
Legal Risk	Perusahaan berpotensi menghadapi sanksi administratif, gugatan perdata, maupun proses pidana apabila ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pencegahan dan penanggulangan karhutla.
Financial Risk	Meningkatnya beban operasional dan belanja perusahaan untuk penyediaan serta pemeliharaan alat berat, patroli, sistem monitoring, tenaga tanggap darurat, pemadaman, hingga kegiatan pemulihan area terdampak.
Reputational Risk	Potensi penurunan reputasi perusahaan apabila wilayah konsesi dikaitkan dengan kejadian karhutla, yang dapat memengaruhi hubungan dengan regulator, masyarakat sekitar, investor, maupun mitra usaha.
Licensing Risk	Ketidakpatuhan terhadap kewajiban pengendalian karhutla dapat meningkatkan risiko dikenakannya sanksi terhadap perizinan berusaha, termasuk pembekuan atau tindakan administratif lainnya sesuai dengan hasil pengawasan dan ketentuan yang berlaku.



Y. Aziz
(Analisis Kredit)

Perkembangan selama Agustus–September 2026 menunjukkan bahwa isu karhutla semakin erat kaitannya dengan aspek tata kelola dan kepatuhan sektor pertambangan. Pemerintah tidak hanya meningkatkan kapasitas pemadaman, tetapi juga memperkuat kewajiban preventif bagi perusahaan serta penegakan hukum terhadap dugaan pelanggaran.

Dengan adanya Inpres Nomor 11 Tahun 2026 dan peningkatan pengawasan oleh Kementerian Kehutanan serta KLH, perusahaan pertambangan perlu memastikan bahwa sistem pencegahan, sarana tanggap darurat, kesiapan alat berat, patroli, serta dokumentasi kepatuhan telah tersedia dan berjalan secara efektif

C. Pasar Mobil Bekas : Tekanan Ekonomi dan Karhutla Mendorong Pergeseran Konsumen ke Pasar Mobil Bekas

Isu kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masif pada tahun 2026 yang diperparah fenomena El Nino ekstrem secara tidak langsung ikut memengaruhi dinamika pasar mobil bekas di Indonesia. Di tengah lesunya pasar mobil baru akibat penurunan daya beli masyarakat, isu lingkungan dan ekonomi makro yang dipicu oleh karhutla memunculkan beberapa dampak serta preferensi baru di pasar kendaraan bekas.

➤ Berikut adalah analisis pengaruh isu kebakaran hutan 2026 terhadap pasar mobil bekas:

- **Pergeseran Wilayah Penjualan dan Tekanan Ekonomi Daerah**

Kebakaran hutan hebat yang melanda wilayah penghasil komoditas utama (seperti Kalimantan dan Sumatra) **menyebabkan penurunan aktivitas ekonomi** di area tersebut akibat kabut asap pekat. **Banyak korporasi yang disegel dan didenda hingga triliunan rupiah.**

Dampaknya: Daya beli masyarakat di wilayah terdampak langsung mengalami penurunan tajam. Akibatnya, pasar mobil bekas di luar Jawa mengalami stagnasi. Sebaliknya, pasokan mobil bekas dari wilayah tersebut cenderung dialihkan ke daerah yang lebih stabil (seperti pulau Jawa) guna menjaga perputaran modal para diler.



- **Peningkatan Risiko Kerusakan Komponen Mobil (Peluang vs Tantangan)**
Asap karhutla yang mengandung partikulat beracun tingkat tinggi (PM2.5) tidak hanya berbahaya bagi kesehatan manusia, tetapi juga berdampak buruk pada kendaraan yang sering beroperasi di wilayah terdampak.
Filter Udara dan AC: Mobil bekas yang berasal dari daerah karhutla rentan memiliki sistem sirkulasi udara (AC) dan filter mesin yang sangat kotor atau cepat rusak.
Dampaknya: Pembeli mobil bekas di tahun 2026 menjadi jauh lebih selektif. Mobil bekas dengan rekam jejak perawatan yang baik di luar zona kabut asap atau mobil yang terbukti lolos inspeksi kebersihan mesin mengalami **kenaikan nilai jual (premium)** dibandingkan mobil yang berasal dari zona merah karhutla.
- **Meningkatnya Kewaspadaan Terhadap Aspek Keselamatan Mobil Listrik (EV) Bekas**
Isu kebakaran hutan dan meningkatnya suhu ekstrem di tahun 2026 memicu kampanye kesadaran publik terkait risiko kebakaran secara umum. Hal ini secara tidak langsung berimbas pada sentimen pasar mobil listrik bekas.
Dampaknya: Kendaraan listrik (EV) baru terus berkembang pesat, namun **pasar mobil listrik bekas di tahun 2026 menghadapi tantangan depresiasi harga yang tajam hingga mencapai 50%**. Kekhawatiran konsumen terhadap ketahanan baterai di tengah cuaca ekstrem dan minimnya fasilitas penanganan kebakaran khusus EV membuat konsumen mobil bekas lebih memilih "Raja-Raja Lama"—yaitu mobil bekas konvensional (BBM/Hybrid) yang dinilai lebih tepercaya dan mudah dirawat.
- **Alternatif Utama di Tengah Pelemahan Daya Beli**
Secara nasional, akumulasi dampak ekonomi dari **karhutla diproyeksikan menimbulkan kerugian negara hingga ratusan triliun rupiah**. Angka inflasi dan biaya kesehatan yang melonjak semakin menekan daya beli masyarakat.
Dampaknya: Alih-alih membeli mobil baru yang harganya terus naik, masyarakat lebih memilih beralih ke pasar mobil bekas demi memenuhi kebutuhan transportasi. Mobil bekas di rentang harga Rp100 juta hingga Rp200 juta menjadi segmen yang paling diburu karena dinilai paling rasional di tengah ketidakpastian situasi ekonomi tahun ini.



➤ **Rekam Jejak Karhutla Harus Jadi Pertimbangan Kredit Perusahaan**

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan industri perbankan maupun non bank diminta **memperkuat pengawasan terhadap pembiayaan perusahaan di sektor perkebunan dan kehutanan yang memiliki risiko kebakaran hutan dan lahan.** Rekam jejak lingkungan perusahaan, termasuk kejadian kebakaran berulang di wilayah konsesi, harus menjadi bagian penting dalam penilaian risiko kredit dan keputusan pembiayaan.



Prinsip kehati-hatian perbankan tidak boleh hanya mengukur kemampuan keuangan debitur. Risiko lingkungan yang dapat menimbulkan kerugian ekonomi, hukum, dan reputasi juga harus **diperhitungkan** secara memadai. Karena itu, OJK perlu memastikan bank dan lembaga pembiayaan melakukan pemeriksaan lingkungan secara mendalam sebelum menyalurkan atau memperpanjang kredit kepada perusahaan di sektor perkebunan dan kehutanan.

OJK juga diminta menyampaikan data agregat mengenai pembiayaan perbankan kepada sektor perkebunan dan kehutanan, termasuk langkah mitigasi yang dilakukan terhadap debitur berisiko tinggi. Menurutnya, transparansi diperlukan agar masyarakat dapat melihat sejauh mana sektor jasa keuangan berkontribusi dalam mencegah kerusakan lingkungan. Namun, OJK mengingatkan agar pengetatan terhadap perusahaan bermasalah tidak justru membatasi akses pembiayaan bagi petani dan masyarakat kecil. Pemerintah bersama OJK dan perbankan perlu memperluas kredit terjangkau bagi petani yang menerapkan pembukaan lahan tanpa bakar, perhutanan sosial, restorasi lahan, serta kegiatan usaha ramah lingkungan.



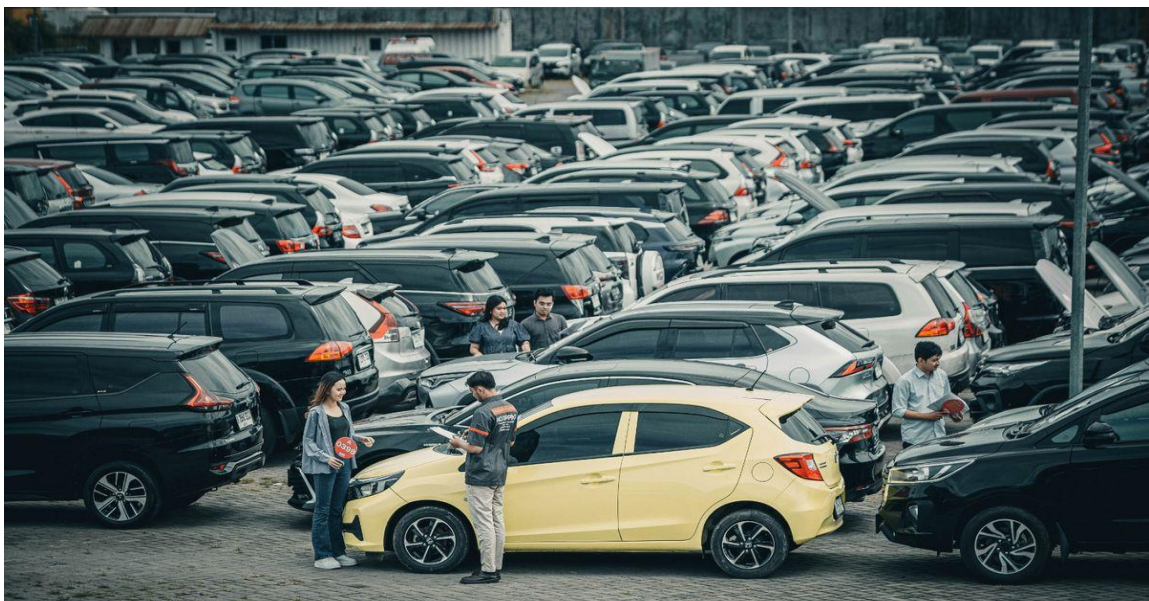
OJK menilai kebijakan pembiayaan berkelanjutan harus mampu menciptakan insentif dan disinsentif yang nyata. Pelaku usaha yang bertanggung jawab perlu mendapatkan akses pembiayaan yang lebih baik, sedangkan perusahaan yang mengabaikan risiko lingkungan harus menghadapi evaluasi yang tegas.

➤ Kondisi Pasar Mobil Bekas

Pasar kendaraan bekas di Indonesia menghadapi tekanan volume transaksi sepanjang periode Januari hingga Agustus 2026. Penyesuaian harga bahan bakar minyak nonsubsidi turut memengaruhi pertimbangan konsumen dalam membeli unit kendaraan. Meskipun efisiensi biaya operasional menjadi perhatian, fluktuasi harga bahan bakar minyak bukan satu-satunya pemicu pergeseran performa pasar.

Salah satu balai Lelang terbesar, yakni JBA Indonesia memaparkan **penurunan volume unit yang berhasil ditransaksikan sepanjang periode Januari – Agustus 2026 hanya lebih dari 28 ribu unit**, sedangkan pada periode tahun sebelumnya lebih dari 39 ribu unit.

Sektor lelang otomotif tetap memiliki potensi transaksi dari konsumen yang membutuhkan kendaraan secara langsung di tengah tekanan pasar secara umum. Fasilitas penitipan unit tetap dibuka untuk memfasilitasi transaksi antara pemilik kendaraan dan pembeli potensial. Skema lelang diposisikan sebagai jembatan untuk mengoptimalkan ketersediaan stok kendaraan dengan permintaan pasar.





Sedangkan menurut pemaparan dari Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO), daya beli masyarakat kelas menengah Tanah Air juga masih mengalami tekanan. Menurutny, hal itu menjadi tantangan dalam menggenjot penjualan mobil nasional.

Harga mobil mengalami kenaikan setiap tahunnya sekitar 7% per tahun. Sementara daya belinya naiknya hanya 3% per tahun. Akibatnya, kita berupaya untuk menembus target penjualan 850 ribu (unit mobil) pada tahun ini. Hingga Agustus 2026, angka penjualan sudah mencapai 500 ribuan unit.

Dibandingkan dengan mobil unit baru, angka penjualan mobil bekas masih lebih menggeliat. Pasar mobil bekas sekitar diangka 1,6–1,7 juta (unit) setahun. Mobil barunya hanya 800 ribuan dua tahun belakangan ini. Kondisi tersebut harus dibalik agar pertumbuhan industri otomotif nasional dapat lebih optimal, terutama dengan mendorong peningkatan penjualan mobil baru melalui penguatan daya beli masyarakat, kemudahan pembiayaan, serta kebijakan yang dapat meningkatkan minat konsumen terhadap kendaraan baru. Peningkatan penjualan mobil baru juga penting untuk menjaga aktivitas produksi, distribusi, industri komponen, dan lapangan kerja di sepanjang rantai industri otomotif, sementara pasar mobil bekas tetap dapat berperan sebagai bagian dari ekosistem kendaraan nasional.



Riko Sanjaya
(Credit Analyst)

Penyesuaian harga BBM nonsubsidi serta tekanan ekonomi makro akibat bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) ekstrem pada 2026 jelas menjadi pukulan ganda bagi pasar otomotif nasional. Ketimpangan antara laju kenaikan harga mobil baru yang mencapai 7% per tahun dengan pertumbuhan daya beli masyarakat yang hanya sebesar 3% menciptakan *gap* ekonomi yang kian melebar. Dampaknya terasa nyata dari lesunya volume lelang di lembaga seperti JBA Indonesia hingga melemahnya aktivitas pasar mobil bekas di luar Jawa—khususnya wilayah Sumatra dan Kalimantan yang mengalami stagnasi ekonomi akibat paparan kabut asap. Kondisi ini membuktikan bahwa faktor ekonomi regional dan isu lingkungan mampu meredam gairah transaksi kendaraan secara signifikan.

Meski demikian, ketimpangan struktur harga ini justru makin mengukuhkan posisi pasar mobil bekas sebagai tumpuan utama mobilitas masyarakat di tengah tekanan daya beli. Volume penjualan mobil bekas yang mencapai



rentang 1,6 hingga 1,7 juta unit per tahun—hampir dua kali lipat dari volume penjualan mobil baru—menegaskan bahwa konsumen kini bersikap jauh lebih realistis. Segmen kendaraan bekas pada kisaran harga Rp100 juta hingga Rp200 juta menjadi pilihan paling rasional bagi kelas menengah. Sektor lelang dan fasilitas penitipan unit pun terus berperan penting sebagai jembatan yang menjaga ketersediaan stok serta perputaran modal di tengah melambatnya arus penjualan kendaraan baru secara nasional.

Dinamika ini pada akhirnya melahirkan preferensi baru di kalangan konsumen yang menuntut para pelaku industri otomotif untuk beradaptasi. Tingginya risiko kerusakan filter dan sistem AC pada unit asal wilayah terdampak karhutla mendorong pembeli menjadi jauh lebih selektif serta bergantung pada inspeksi rekam jejak perawatan. Di sisi lain, kekhawatiran atas risiko cuaca ekstrem dan penyusutan harga yang tajam pada mobil listrik (EV) bekas membuat masyarakat tetap memprioritaskan mobil konvensional atau *hybrid*. Agar pertumbuhan industri otomotif nasional dapat pulih secara optimal, pemerintah dan pelaku industri perlu segera memperkuat daya beli masyarakat serta menghadirkan skema pembiayaan baru yang lebih terjangkau, tanpa mengesampingkan peran pasar mobil bekas sebagai bagian integral dari ekosistem kendaraan nasional.

Sumber :

- <https://www.iqair.com/id/newsroom/wildfire-map-spotlight-indonesia-forest-and-peatland-fires-september-2026>
- <https://gankapital.com/id/artikel/dampak-ekonomi-karhutla-kalimantan-2026/>
- <https://muc.co.id/id/article/karhutla-2026-berpotensi-kurangi-penerimaan-pajak-daerah-rp26986-miliar>
- <https://rmol.id/politik/read/2026/08/24/719381/rekam-jejak-karhutla-harus-jadi-pertimbangan-kredit-perusahaan>
- <https://ekonomi.republika.co.id/berita/tlhzkn423/daya-beli-kelas-menengah-tergerus-gaikindo-kejar-target-penjualan-mobil>
- <https://suaragarut.id/jba-indonesia-penurunan-penjualan-mobil-bekas>





- <https://otomotif.kompas.com/image/2026/09/17/141200415/harga-bbm-naik-apakah-berpengaruh-terhadap-penjualan-mobil-bekas-?page=2>
- <https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/117671/ojk-tren-pembiayaan-alat-berat-juni-2026-terkontraksi-0-22/2>
- <https://www.ummy.ac.id/pemicu-utama-karhutla/>
- <https://kalteng.antaranews.com/amp/berita/839088/dpkp-kotim-minta-petunjuk-inspektorat-untuk-penghapusan-aset-ekskavator-terbakar>
- <https://www.detik.com/kalimantan/berita/d-8639755/alat-berat-terbakar-di-tengah-karhutla-km-11-kobar-asal-api-dipertanyakan/>
- <https://www.seputarborneo.com/news/25905-grader-terjebak-kepungan-api-alat-berat-perusahaan-sawit-terbakar-di-bagendang.html>
- <https://kalteng.antaranews.com/berita/839815/pemkab-kotim-kerahkan-ekskavator-buat-sekat-bakar-cegah-karhutla-meluas>
- <https://kalteng.antaranews.com/berita/840380/ekskavator-dikerahkan-gali-embung-untuk-penanganan-karhutla-di-kotim>
- <https://www.cnbcindonesia.com/news/20260921071808-4-769383/resmi-harga-bbm-di-spbu-pertamina-bp-shell-berlaku-21-september-2026>
- <https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/120276/klh-seret-19-perusahaan-ke-proses-hukum-kasus-karhutla>
- <https://nasional.kompas.com/read/2026/08/23/13500351/pemerintah-bolehkan-perusahaan-sawit-dan-tambang-bantu-padamkan-kebakaran>
- <https://wartaekonomi.co.id/read632740/perusahaan-tambang-wajib-siapkan-ekskavator-untuk-cegah-karhutla-ini-perintah-prabowo>
- <https://www.kehutanan.go.id/news/kemenhut-jatuhkan-sanksi-6-perusahaan-terkait-karhutla-hingga-pembekuan-perizinan-berusaha>
- <https://www.inilah.com/walhi-ungkap-sejumlah-perusahaan-sawit-dan-tambang-yang-diduga-terlibat-karhutla-kalimantan>

